



Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh

Trisha Caicartica Lovinta Nugraha¹, M. Chairil Akbar Setiawan^{1*}, Sindy Yulia Putri¹
¹Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Jul 10, 2022

Diterima: Jul 20, 2023

Dipublikasi: Jul 30, 2023

KATA KUNCI:

Fast Fashion; Neoliberal; Non Ethical; Offshore Outsourcing

KORESPONDEN:

M. Chairil Akbar Setiawan

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email:

mchairilakbars@upnvj.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Nugraha, T. C. L., Setiawan, M. C. A., & Putri, S. Y. (2023). Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh. *Journal of Political Issues*, 5(1); 110-123
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.132>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.132>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Because it's massive influence to the consumer around the world, fast fashion is probably a very familiar term that most of us have heard. Despite it's fame, though, fast fashion is also well known as a business model that possess a very complicated supply chain. Due that complex supply chain process, they are also caught up in non ethical practices towards it's workers as well as the environment. Sadly, as one of the biggest producing fast fashion countries in the world, Bangladesh doesn't seem to mind about the destructive nature of fast fashion and turn a blind eye towards its effect. Therefore, this research was aimed to provide an explanation of how offshore outsourcing dynamics in fast fashion supply chain causing decline to Bangladesh's environmental quality through ready made garment sector and how the government involved in the case under neoliberal influence using qualitative methods and study case approach. As a result, researcher found that offshore outsourcing strategy in fast fashion business caused a numerous effect on environment such as water contamination, air pollution, and waste buildup on the ground.

Abstrak Berkas pengaruhnya yang besar terhadap konsumen di seluruh dunia, fast fashion mungkin adalah istilah yang sangat akrab bagi banyak orang. Meskipun populer, fast fashion juga dikenal sebagai model bisnis yang memiliki rantai pasokan yang sangat rumit. Karena proses rantai pasokan yang kompleks itu, mereka diketahui melakukan praktik yang tidak etis terhadap para pekerjanya dan juga lingkungan. Sayangnya, sebagai satu negara pemasok fast fashion terbesar di dunia, Bangladesh tampaknya tidak keberatan dengan sifat destruktif fast fashion dan menutup mata terhadap dampak yang diciptakan oleh industri tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana dinamika offshore outsourcing dalam rantai pasokan fast fashion menyebabkan penurunan kualitas lingkungan Bangladesh melalui sektor pakaian jadi dan bagaimana pemerintah terlibat dalam kasus ini di bawah pengaruh neoliberal menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa strategi offshore outsourcing dalam bisnis fast fashion menyebabkan banyak dampak buruk terhadap lingkungan seperti kontaminasi air, polusi udara, dan penumpukan limbah padat di atas permukaan tanah.

TENTANG PENULIS:

Trisha Caicartica Lovinta Nugraha, Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan tugas akhir.

M. Chairil Akbar Setiawan, menyelesaikan studi Magister (S2) Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Sindy Yulia Putri, menyelesaikan studi Magister (S2) Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

PENDAHULUAN

Disamping makanan dan tempat tinggal, pakaian merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia. Selain digunakan untuk memproteksi tubuh dari lingkungan sekitar, cara seseorang berpakaian juga berperan sebagai sebuah alat semiotika atau alat komunikasi yang dapat diinterpretasikan melalui objek visual (non-verbal). Menurut kajian sosial yang dilakukan oleh Roland Barthes, fashion merupakan sebuah bentuk ideologi yang diisyaratkan melalui cara seseorang berpakaian (Barthes et al., 1983) Teori tersebut didukung oleh pernyataan Thomas yang mengartikan fashion sebagai sebuah bahasa isyarat yang secara non-verbal menginterpretasikan seorang individu maupun kelompok. Menurutnya, secara simbolis fashion mengekspresikan gaya unik, identitas, status sosial, dan afiliasi gender maupun kelompok yang ada pada diri seseorang (Thomas, 2023).

Sebelum Revolusi Industri, masyarakat memiliki komunitas tersendiri untuk membuat pakaian mereka. Selain menjahit pakaian mereka sendiri, ada pula jasa untuk memperbaiki segala pakaian yang rusak atau sobek. Karena itu, setiap orang hanya memiliki beberapa pakaian dan setiap pakaian digunakan dalam intensitas yang tinggi pada saat itu. Tidak banyak bisnis pakaian karena pakaian membutuhkan waktu yang lama untuk diproduksi, selain itu masyarakat juga bisa membuat pakaiannya sendiri. Namun, begitu Revolusi Industri dimulai, penemuan-penemuan baru bermunculan sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak. Karena pabrik-pabrik memiliki mesin baru yang menenun dan memproduksi kapas dengan kecepatan lebih tinggi, mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk mengatur kain, mengoperasikan mesin, dan memfasilitasi seluruh proses. Hal ini membawa peningkatan dalam bisnis dan mendorong orang meninggalkan rumah mereka untuk bekerja lebih sering (Perkins, 2013).

Perubahan tatanan sosial, politik, lingkungan, dan budaya yang mulai terjadi sejak Revolusi Industri pertama hingga saat ini pun masih bisa dirasakan dampak baik maupun buruknya secara global. Ketersediaan pakaian, sepatu, maupun peralatan rumah tangga yang diproduksi secara massal membuat segala kebutuhan menjadi lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung dan meningkatkan kualitas hidup, bahkan status sosial di masyarakat. Ditemukannya alat-alat komunikasi serta transportasi juga menciptakan efisiensi tenaga kerja sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Selain itu, pertumbuhan industri juga melahirkan tenaga kerja yang terspesialisasi. Namun, walaupun banyak membawa perubahan baik, industrialisasi juga menciptakan permasalahan baru. Akibat adanya industrialisasi, penduduk melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan di pabrik yang menimbulkan kepadatan dan kekumuhan di kota. Para buruh juga dipekerjakan dalam waktu yang tidak sesuai dengan upahnya. Selain itu, mesin-mesin pabrik yang kotor dan menimbulkan polusi membahayakan kesehatan para buruh dan juga lingkungan sekitarnya. Belum lagi adanya polusi air dan udara, berkurangnya keanekaragaman hayati, kerusakan habitat liar, bahkan pemanasan global (Rafferty, 2017).

Sebagai salah satu industri tertua, industri fashion juga tentunya turut andil dalam kerusakan yang diakibatkan oleh industrialisasi. Menurut Dana Thomas, sedari dulu industri fashion merupakan bisnis 'kotor' yang mengeksploitasi manusia dan lingkungan demi keuntungan berlipat-lipat. Dalam rantai produksinya, perbudakan, buruh anak, dan buruh penjara merupakan hal yang telah ada selama bertahun-tahun. Eksploitasi tersebut diperburuk dengan munculnya strategi offshore outsourcing yang kini banyak dimanfaatkan dalam proses manufaktur berbagai komoditas, termasuk tekstil dan garmen (Thomas, 2019). Sejak Revolusi Industri, perusahaan-perusahaan terus berinovasi untuk dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan pasar serta keuntungan mereka. Model dari sebagian besar perusahaan pada abad ke-20 adalah perusahaan yang dapat memiliki, mengelola, dan mengontrol langsung asetnya. Namun, pada tahun 1970-an dan 1980-an, struktur manajemen

yang tidak efisien dalam model tersebut mengakibatkan persaingan global terhambat. Karena itu, untuk meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas mereka, banyak perusahaan besar mengembangkan strategi baru dengan berfokus pada bisnis inti mereka dan mengalihdayakan pekerjaan lain yang tidak dapat dilakukan oleh tim internal. Hal tersebut mendorong lahirnya strategi outsourcing yang dikenal dan dimanfaatkan dengan luas hingga saat ini.

Dengan adanya perkembangan strategi produksi, produksi garmen pun meningkat sebanyak dua kali lipat setiap tahunnya sejak tahun 2000, bahkan telah melampaui 100 miliar buah pada tahun 2014 (Remy et al., 2016). Sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa produksi serat tekstil global yang sebelumnya hanya berkisar pada 8,4 kilogram per individu pada tahun 1975 melonjak hingga 14 kilogram per individu pada tahun 2020 (Statista, 2019). Selama beberapa puluh tahun terakhir, industri tekstil memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Bangladesh. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Bangladesh Bank dalam jangka waktu 2012-2021, sektor tekstil dan pakaian di Bangladesh memperoleh rata-rata FDI sekitar US\$382,5 juta dan secara konstan masuk ke dalam 5 sektor teratas dengan total FDI tertinggi. Dengan pencapaian tersebut, negara ini bahkan menjadi tuan rumah bagi lebih dari 4000 pabrik garmen yang beroperasi, dengan estimasi tenaga kerja yang mencapai lebih dari 4 juta orang. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir saja sektor Ready Made Garment (RMG) telah menyumbangkan rata-rata sekitar 81% dari total komoditas ekspor yang diperdagangkan Bangladesh ke luar negeri dengan estimasi rata-rata pendapatan dalam jangka waktu yang sama sebesar US\$27,1 miliar. Meskipun begitu, pertumbuhan positif tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi lingkungan di sana. Karena menaungi ribuan pabrik tekstil yang bekerja sama dengan perusahaan multinasional, rakyat Bangladesh harus menerima kenyataan bahwa lingkungan mereka telah mengalami degradasi yang cukup signifikan akibat proses produksi tekstil besar-besaran yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Sebagai negara manufaktur RMG kedua yang menjadi favorit negara-negara di dunia setelah China, kondisi ekologi Bangladesh tentunya tak dapat terhindar dari degradasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Rachel Bick, Erika Halsey, dan Christine Ekenge (2018), keberadaan setiap garmen yang diproduksi dari sistem fast fashion tidak hanya memberikan kesempatan bagi konsumen untuk membeli pakaian dengan harga yang terjangkau, tetapi juga secara signifikan membawa risiko degradasi kesehatan manusia dan lingkungan disekitarnya. Beberapa risiko tersebut diantaranya disebabkan oleh kultivasi katun yang mengakibatkan terbuangnya begitu banyak air, pembuangan cat yang tidak diolah ke sumber mata air lokal, hingga rendahnya upah buruh dan kondisi kerja yang buruk. Karena itu, menurut Nelson Oly Ndubisi dan Arne Nygaard (2018) dibalik praktik outsourcing yang menjanjikan, tidak ada jaminan bahwa proses operasinya dijalankan secara beretika. Menurut mereka, etika dalam berbisnis sejatinya dapat dikurangi ketika tujuan dalam proses outsourcing adalah untuk menghilangkan biaya transaksi atau produksi.

Berdasarkan penelitian Alexandra Grace Speed (2021), skala kerusakan yang disebabkan oleh perilaku tersebut dapat diperparah dengan kebijakan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang justru lebih melindungi bisnis fast fashion daripada tenaga kerja dan lingkungan dalam lingkup internasional. Hal tersebut dapat terjadi karena undang-undang federal di Amerika Serikat saja sama sekali tidak mengatur tentang offshore outsourcing, tetapi praktik bisnis ini sangat dilindungi oleh North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan beberapa perjanjian internasional lainnya. Saat ini, kontrak bisnis di Amerika Serikat diregulasi oleh negara bagian, itulah sebabnya negara bagian seperti California dapat meloloskan undang-undang yang memberikan preferensi kontrak kepada perusahaan yang terus beroperasi di Amerika Serikat. Kontrak bisnis internasional tersebut memiliki kemampuan untuk memilih hukum negara mana yang berlaku, di pengadilan apa, dan bagaimana sengketa akan ditindaklanjuti. Dengan begitu, perusahaan dapat memilih sendiri sistem hukum yang lebih longgar untuk mengatur kontrak mereka.

Menurut ILO, sekitar 60% produksi garmen global terkonsentrasi di Asia yang menjadi rumah dari puluhan LMICs produsen garmen. Itulah alasan mengapa dampak terbesar dari produksi garmen terjadi di benua ini. Berangkat dari fakta yang memprihatinkan tersebut, Karan Khurana dan S.S. Muthu (2021) pun berpendapat bahwa dibalik pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, sebenarnya dalam praktik bisnis fast fashion negara-negara low and middle income countries (LMICs) dirugikan dari segi tenaga kerja dan lingkungan. Meskipun begitu, praktik produksi yang berkelanjutan tidak pernah diterapkan di LMICs karena adanya beragam hambatan internal seperti kurangnya tata kelola, kesadaran, dan korupsi yang ada di negara-negara tersebut. Warga negara yang tidak berpendidikan sama sekali tidak mengetahui akibat dari konsumsi dan produksi yang berlebihan. Selain itu, pabrik sub-kontrak (skala kecil dan menengah) sering dimiliki oleh pemilik yang tidak mendapat informasi yang sepenuhnya mengabaikan komplikasi lingkungan dari memproduksi dan menjual pakaian dalam jumlah besar. Karena banyaknya situasi tidak menguntungkan bagi negara LMICs yang disebabkan oleh dinamika bisnis fast fashion, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan globalisasi sesungguhnya hanya dimiliki oleh merek-merek asing dan vendor manufaktur mereka di negara-negara produsen.

METODE PENELITIAN

Strategi bisnis fast fashion meliputi rantai pasokan yang sangat kompleks sehingga kebanyakan perusahaan multinasional menggunakan jasa offshore outsourcing untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya yang perlu mereka keluarkan. Namun, untuk menjaga stabilitas pengeluaran, perusahaan harus memastikan bahwa para pemasok memberikan apa yang mereka inginkan, terutama harga jasa yang murah. Tuntutan atas biaya murah yang konstan di tengah pertumbuhan inflasi tersebut mendorong pemasok untuk terus memutar otak dan menghalalkan segala cara agar ongkos produksi dapat ditekan, seperti mengurangi pemeliharaan pabrik, gaji buruh, serta pengelolaan limbah yang berdampak pada kerusakan lingkungan, peningkatan risiko kesehatan dan keselamatan, serta tidak sejahteranya buruh.

Meskipun secara tidak langsung menyebabkan degradasi sosial dan lingkungan di negara pemasok yang umumnya merupakan negara dengan pendapatan rendah dan menengah, perusahaan fast fashion tidak bekerja sendirian. Penyebab utama di balik mulusnya praktik pengalihdayaan yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional di low and middle income countries seperti Bangladesh tidak lain adalah kebijakan yang dibuat pemerintah. Melalui campur tangan para pembuat kebijakan di suatu negara, perusahaan multinasional dapat dengan mudah melakukan investasi maupun kerja sama di negara tersebut. Dengan begitu, pemerintah Bangladesh juga memiliki andil dalam kerusakan lingkungan yang terjadi di negaranya. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin mengkaji dampak negatif bagi lingkungan serta peran pemerintah di balik terjadinya degradasi lingkungan di Bangladesh.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan sebuah metode pendekatan untuk penelitian yang dimulai dengan asumsi, sudut pandang interpretif atau teoretikal, serta studi tentang masalah penelitian yang mengeksplorasi makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau manusia (Creswell, 2013) Dalam penelitiannya, peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam kondisi alamiahnya dengan tujuan untuk memahami atau menafsirkan fenomena dalam bahasa dengan konteks tertentu (Denzin & Lincoln, 2018) Penelitian kualitatif sendiri menggunakan sebuah prosedur tanpa adanya pembuatan data numerikal (Richards & Schmidt, 2013) Alih-alih menghasilkan data berupa deretan angka, data yang dihimpun dalam penelitian kualitatif cenderung membentuk kata-kata atau gambar. Hasil tertulis dari penelitian ini berisi kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan memperkuat argumen (Bogdan & Biklen, 2007).

HASIL PENELITIAN**Perkembangan Sektor Ready Made Garment di Bangladesh**

Demi mencapai tujuan menjadi negara berpendapatan menengah di era globalisasi, Bangladesh telah berupaya melakukan reformasi industri. Serupa dengan negara-negara lainnya, perkembangan pesat industri-industri di Bangladesh telah memberikan manfaat bagi perkembangan sosial ekonomi, menciptakan banyak peluang kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di negara tersebut (Zohir, 2001). Namun, terdapat satu industri yang paling menonjol di Bangladesh, yaitu industri tekstil dan garmen. Meskipun industri tekstil dan garmen di Bangladesh baru dimulai pada akhir 1970-an, dalam waktu singkat industri ini mampu menjadi salah satu industri yang paling berpengaruh dalam perekonomian di negara tersebut. Sepanjang perjalanannya, industri ini telah berkontribusi pada pendapatan ekspor, pendapatan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan (Haider, 2007). Secara khusus, sektor yang mengalami pertumbuhan luar biasa dalam industri tekstil dan garmen di Bangladesh sendiri adalah sektor Ready Made Garment (RMG) atau pakaian jadi. Pesatnya perkembangan sektor RMG di Bangladesh dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, di antaranya adalah pengenalan sistem kuota Multi Fibre Arrangement (MFA), ketersediaan tenaga kerja berbiaya rendah, serta keberadaan sektor garmen domestik kecil untuk membangun industri (Balchin & Calabrese, 2019). Selain didorong oleh MFA dan beberapa faktor domestik lainnya, pertumbuhan sektor RMG Bangladesh juga didukung oleh reformasi kebijakan industri nasional serta penyesuaian struktural yang dipelopori oleh IMF dan World Bank.

Praktik Non Etikal Offshore Outsourcing dalam Sektor RMG di Bangladesh

Keberadaan mekanisasi dan otomatisasi di era industrial tidak mengurangi peran manusia dalam perusahaan industri karena sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas serta mengurangi biaya. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan input penting dalam produksi industri, termasuk industri tekstil dan garmen di Bangladesh (Yunus & Yamagata, 2012). Saat ini, lingkungan bisnis global mendorong perusahaan manufaktur besar untuk mengalihkan fasilitas produksi mereka ke luar negeri. Dengan cara ini, perusahaan dapat memiliki kemampuan manufaktur tanpa harus menginvestasikan modal (Narasimhan & Das, 1999). Akibatnya, terjadi peningkatan penerapan sistem offshore outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, terutama dalam industri tekstil dan garmen. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk melakukan pengalihdayaan produksi pakaian ke luar negeri antara lain adalah biaya tenaga kerja yang rendah, tarif, kualitas produk, waktu tenggang, nilai tukar, biaya transportasi, serta kemampuan produsen dalam mengikuti tren mode. Karena kriteria tersebut dapat dengan mudah ditemukan di negara-negara berkembang, perusahaan multinasional kerap melakukan pengalihdayaan pembuatan produk mereka ke negara-negara tersebut untuk mengambil keuntungan dari biaya tenaga kerja yang jauh lebih rendah.

Namun, siklus rantai pasokan industri fashion yang dirancang demi keuntungan manusia semata merupakan tindakan yang berlawanan dengan pandangan kaum environmentalis. Karena itu, untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh rantai pasokan yang kian destruktif, sebuah batasan yang berbasis ekosentrisme dikembangkan di industri fashion. Meskipun batasan tersebut sulit didefinisikan, inti dari ethical fashion adalah melakukan perdagangan yang adil tanpa melukai hak para pekerja dan juga merusak lingkungan. Beberapa praktik non etikal dalam strategi industri tekstil dan garmen yang menjadi perhatian dunia antara lain adalah sebagai berikut.

1. Eksploitasi Tenaga Kerja

Trisha Caicartica Lovinta Nugraha, M. Chairil Akbar Setiawan, Sindy Yulia Putri

Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh

Berdasarkan undang-undang buruh di Bangladesh, bekerja lebih dari sepuluh jam sehari merupakan sebuah pelanggaran. Menurut laporan ILO pada tahun 2019, dari total 111 pabrik RMG, setidaknya 40 di antaranya mempekerjakan para buruh selama 11 hingga 15 jam (Raihan et al., 2017). Selain adanya pelanggaran jam kerja, ditemukan pula banyak pabrik RMG yang berkondisi tidak layak seperti kekurangan ventilasi dan sinar matahari, serta tidak adanya langkah-langkah keselamatan kebakaran yang tepat. Di samping itu, sebuah survei terhadap 180 pekerja garmen melaporkan bahwa sebagian besar dari mereka pernah mendapatkan kekerasan berupa serangan fisik, diskriminasi, hukuman moneter, pelecehan psikologis dan seksual (Sohani et al., 2011).

2. Praktik Subkontrak

Akibat dari adanya tekanan atas permintaan produksi yang murah dan cepat, para produsen justru banyak yang mensubkontrakkan proses produksi tertentu seperti pewarnaan, penununan, finishing, pemotongan dan penjahitan ke pabrik-pabrik lain tanpa sepengetahuan perusahaan mitra. Dengan begitu, kegiatan subkontrak sangat tidak transparan dan sulit untuk diawasi. Selain itu, upah dan kondisi kerja di pabrik subkontrak seringkali lebih buruk daripada di pabrik pemasok resmi dan bahkan mendorong munculnya isu kerja paksa dan perbudakan (Ganguly & Human Rights Watch, 2015)

3. Pengelolaan Limbah Non Etikal

Produksi besar-besaran dalam industri garmen dapat mempercepat jejak lingkungan pakaian. Karena itu, operasi unit manufaktur yang tidak tepat dapat menghasilkan lebih banyak limbah dan menjadi salah satu alasan terpenting dari pencemaran dan degradasi lingkungan di banyak kota dan kawasan industri. Beragam jenis limbah yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari air, tanah, maupun udara di sekitar area pabrik dan menyebar ke tempat-tempat lainnya sehingga menciptakan degradasi lingkungan dan risiko kesehatan yang serius (Bhuiya, 2017).

Dampak Offshore Outsourcing Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh

Pendirian pabrik-pabrik tekstil dan garmen di sekitar area pemukiman atau area tertentu tanpa adanya pertimbangan atas kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat pun telah mendorong peningkatan limbah hasil produksi yang biasanya dibuang begitu saja tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan Environment Conservation Rules 1997, proses manufaktur dalam industri tekstil dan garmen di Bangladesh masuk ke dalam kategori 'Red,' yaitu kegiatan dengan lokasi dan dampak yang paling berbahaya bagi lingkungan. Dengan begitu, tentunya pembuangan limbah produksi tekstil dan garmen yang dilakukan secara sembarangan mengakibatkan kualitas lingkungan di sekitar area pabrik garmen menurun, menyebabkan masalah yang lebih besar dan meluas ke aspek kehidupan lainnya. Meskipun memiliki sekitar dua ratus regulasi terkait perlindungan lingkungan, kerangka hukum lingkungan di Bangladesh gagal menggarisbawahi elemen-elemen kunci dari aturan hukum lingkungan dalam membuat, memberlakukan, dan menegakkan hukum tentang lingkungan. Bangladesh berada di peringkat ke-162 dari 180 negara dalam Environmental Performance Index (EPI) 2020. Sesuai laporan EPI, Bangladesh hanya mendapat skor 29 dari 100 berdasarkan berbagai indikator keberlanjutan (Sarwar, 2021). Akibatnya, lingkungan di Bangladesh tidak terlindungi dan sangat rentan terdegradasi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang menggunakan jasa *offshore outsourcing* di Bangladesh, maka akan semakin luas pula perilaku eksploitatif para pebisnis yang secara tidak langsung menekan para pemasok atau produsen untuk melakukan praktik non etikal. Kombinasi dari perilaku eksploitatif perusahaan multinasional dan regulasi yang lemah di Bangladesh akhirnya membuat para produsen terpaksa menekan biaya produksi mereka untuk memenuhi permintaan dengan berbagai cara seperti terus mengurangi upah

buruh dan pengelolaan limbah agar menjadi lebih kompetitif. Perilaku tersebut pun menyebabkan permasalahan lingkungan yang terkait dengan peningkatan limbah dan polusi yang di antaranya meliputi tiga aspek berikut.

1. Kontaminasi Perairan

Dalam mengolah produk tekstil, industri ini menggunakan air dalam jumlah tinggi dalam berbagai tahapan seperti pewarnaan, finishing, dan pencucian. Air yang telah digunakan dalam tahapan-tahapan produksi tersebut kemudian menjadi limbah (Brik et al., 2006) Namun, air limbah dari produksi tekstil seringkali sulit untuk diolah karena komposisi kimianya bervariasi (Bhuiya, 2017) Oleh karena itu, banyak pabrik tekstil yang memilih untuk tidak mengolah air limbah mereka dan membuangnya begitu saja ke saluran air maupun situs-situs yang ilegal seperti sungai. Di Bangladesh sendiri, beberapa pabrik mengolah air limbah mereka, tetapi banyak yang tidak memiliki mesin pengolahan atau memilih untuk tidak mengoperasikannya untuk menghemat biaya (Yardley, 2013).

Sungai dan badan air di dekat zona industri tekstil di Bangladesh adalah penerima utama limbah yang tidak diolah yang dibuang oleh industri tekstil (Hossain et al., 2018). Menurut dokumentasi Deutsch Welle, yang melakukan penelusuran terkait praktik pembuangan limbah tekstil ke sungai di Dhaka, pabrik-pabrik tekstil di sana telah meracuni sungai dengan menghubungkan pipa-pipa air limbah mereka yang terlihat kotor dan mengeluarkan bau kimia yang kuat ke sungai. Tingginya intensitas limbah tekstil yang ada di sungai pun menjadi salah satu penyebab sungai-sungai yang mengalir di ibu kota Bangladesh tersebut menjadi sungai yang mati secara biologis (Flintz & Pützstück, 2020). Pada tahun 2021, dilaporkan bahwa 6 sungai yang mengalir di sekitar Dhaka, yaitu Buriganga, Sitalakhya, Bangshi, Turag, Balu, dan Dhaleshwari, telah dianggap sebagai sungai yang mati secara biologis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada oksigen yang tersisa di dalam sungai sama sekali sehingga tidak ada kehidupan akuatik yang bisa bertahan hidup di dalam air (Sakib, 2021). Karena kondisi sungai yang memprihatinkan, populasi ikan di sungai-sungai Dhaka pun merosot tajam dan menyebabkan ribuan nelayan kehilangan pekerjaan (Flintz & Pützstück, 2020)

Menurut seorang ahli lingkungan, Shahriar Hossain, tak hanya limbah tekstil, tetapi semua limbah kota, sampah industri, dan cairan beracun langsung dibuang ke enam sungai itu. Akibatnya, air dari semua sungai di sekitar Dhaka telah terkontaminasi dan tidak dapat digunakan serta dimurnikan lagi. Otoritas penyedia air bahkan harus membawa air dari luar kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk Dhaka. Selain tidak lagi dapat menjadi habitat bagi ikan-ikan air tawar dan digunakan sebagai air minum, air sungai di Dhaka yang telah tercemar tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan sehari-hari masyarakat (Sakib, 2021). Masyarakat marginal yang tinggal di tepi sungai terutama anak-anak, rentan terhadap berbagai jenis penyakit terkait polusi, seperti mual, luka pada kulit, iritasi pada saluran pernapasan, dan sebagainya

2. Peningkatan Polusi Udara

Di industri tekstil, sebagian besar proses produksi dan distribusi menghasilkan emisi gas ke atmosfer. Itulah mengapa emisi gas dianggap sebagai polusi terbesar kedua setelah limbah cair di industri tekstil (A. Hossain & Hossain, 2020) Permasalahan polusi di Bangladesh sendiri dapat dikategorikan sebagai isu yang cukup memprihatinkan. Pada tahun 2021 lalu, IQAir (sebuah perusahaan teknologi kualitas udara yang berbasis di Swiss), melaporkan bahwa Dhaka, ibu kota Bangladesh, merupakan kota dengan polusi udara tertinggi di dunia dengan tingkat polusi sebesar 76.9 µg/m. Menurut IQAir, polusi udara di Dhaka utamanya disebabkan oleh kegiatan industri yang dilakukan oleh berbagai pabrik dan bisnis lokal yang terkonsentrasi

di kota tersebut. Selain itu, penggunaan alat transportasi yang dengan intensitas tinggi juga menjadi pendorong terjadinya polusi udara di Dhaka, ditambah lagi dengan tidak adanya peraturan terkait penggunaan kendaraan yang tak layak jalan (IQAir, 2021). Namun, polusi udara yang secara khusus disebabkan oleh rantai pasokan fast fashion di Bangladesh dapat disebabkan melalui dua proses berikut.

a) Produksi

Dalam proses produksi, sebagian besar polusi udara umumnya dihasilkan pada tahap finishing karena proses tersebut berhubungan dengan pelapisan kain yang menggunakan beragam bahan kimia. Elemen-elemen yang dihasilkan pada tahapan tersebut akhirnya akan bercampur dengan atmosfer atau udara dalam bentuk uap saat diproses dalam suhu tinggi dan menyebabkan polusi (A. Hossain & Hossain, 2020). Selain itu, proses produksi tekstil juga menghasilkan mikroplastik melalui pelepasan serat mikroplastik yang terjadi selama proses pembuatan yaitu pemintalan benang, penununan, perajutan, penyikatan dan pemotongan kain. Mikroplastik juga dapat luruh dalam proses pencucian karena pakaian saling bergesekan dan menyebabkan abrasi (Mashoven et al., 2022).

b) Distribusi

Untuk mampu bersaing di pasar global, pemasok fast fashion harus selalu mampu menyediakan produk baru kepada klien dan merespons perubahan pasar dengan lebih cepat (Bottani et al., 2014). Kecepatan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan penggunaan transportasi berkapasitas besar. Namun, karena rantai pasokan di industri ini cukup kompleks, energi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman bahan baku dan produk akhir menggunakan alat transportasi tentunya tidak sedikit. Sebuah studi menunjukkan bahwa pengangkutan kapas yang ditanam di ladang Amerika Serikat, dibuat dan dijahit di Bangladesh dan dikirimkan ke gudang ritel di Jerman menyumbang 290 gram emisi CO₂ untuk setiap kaos yang diproduksi.

3. Pencemaran Tanah

Menurut EPA, sumber utama limbah padat kota yang berasal dari tekstil adalah pakaian yang dibuang. Saat ini, industri tekstil Bangladesh sendiri diperkirakan menghasilkan 500.000 ton limbah tekstil setiap tahunnya yang sebagian besar terdiri dari benang, sisa-sisa potongan, ujung gulungan, kelebihan produksi, serta potongan garmen yang tidak lolos uji kualitas. Akumulasi dari sampah padat tersebut kadang-kadang bisa sebanyak 47% dari total input bahan baku produksi garmen (Uddin et al., 2020). Sementara itu, pencemaran tanah yang disebabkan oleh kegiatan industri tekstil dan garmen bukan hanya disebabkan oleh penumpukan limbah padat, tetapi juga limbah air. Para petani di negara-negara berkembang biasanya memanfaatkan air sungai dan kanal untuk mengairi tanah mereka. Namun, air dari sumber-sumber ini sering tercemar oleh limbah tekstil yang mengandung zat berbahaya seperti logam berat yang berupa tembaga, paladium, kadmium, dan seng (A. Hossain & Hossain, 2020). Hal itu mengakibatkan tanah tercemar dan tidak baik jika digunakan sebagai media tumbuh tanaman. Selain itu, sulitnya mendaur ulang pakaian juga menyebabkan pembuangan sampah pakaian ke tempat pembuangan akhir menjadi pilihan yang paling banyak dilakukan. Akibat dari banyaknya sampah tekstil padat yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sampah-sampah tersebut pun menggunung dan memakan banyak ruang terbuka. Selain menggunakan banyak ruang, tumpukan sampah tekstil yang terdekomposisi juga menghasilkan gas metan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sedangkan serat mikro yang terkandung

dalam sampah pakaian juga dapat terurai dan terbang ke udara dan masuk ke sistem pernapasan.

Penyebab Kegagalan Pemerintah Bangladesh dalam Mengimplementasikan Regulasi Lingkungan untuk Sistem Offshore Outsourcing di Sektor Ready Made Garment

1. Tekanan Politik

Berdasarkan asumsi Green, pemerintahan yang terlalu tersentralisasi akan menghambat penanggulangan masalah lingkungan. Maka dari itu, sebuah negara bangsa membutuhkan desentralisasi karena mereka memiliki skala yang terlalu besar untuk masalah lingkungan yang hanya bisa diselesaikan dengan langkah-langkah lokal, tetapi juga terlalu kecil karena masalah lingkungan memiliki fitur global (Paterson, 2005) Bangladesh sendiri sebenarnya sudah memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, tetapi pengimplementasian desentralisasi pemerintahan di Bangladesh cenderung disalahgunakan untuk menguntungkan elit lokal.

Selama beberapa dekade terakhir, ada tekanan yang meningkat pada kepemimpinan politik untuk mengasosiasikan anggota parlemen dengan kegiatan pembangunan lokal. Para anggota parlemen tersebut diberi peran penasihat atas proyek-proyek pembangunan lokal, serta diberikan dana oleh pemerintah pusat untuk pembangunan daerah untuk skema darurat dan inovatif. Karena adanya sistem yang memberikan otoritas kepada anggota parlemen, sistem pemerintahan daerah di Bangladesh dapat dikatakan kurang baik karena kontrol mereka atas proyek-proyek pembangunan lokal akan menciptakan lebih banyak peluang bagi penyebaran politisasi, korupsi dan patronase (Sarker, 2003). Dengan begitu, penegakan hukum lingkungan di Bangladesh seringkali lemah karena ada banyak pemilik pabrik lokal yang memiliki kekuasaan dan menjabat di parlemen atau memiliki relasi yang dekat dengan anggota parlemen. Mereka yang memiliki kekuasaan tersebut biasanya menjaga hubungan dekat dengan banyak pejabat kunci di pemerintahan sehingga mereka dapat mengabaikan atau menunda permintaan terhadap proses manufaktur berkelanjutan yang mengakibatkan peningkatan masalah kesehatan dan keselamatan buruh maupun masalah lingkungan (Khan et al., 2020)

Selain itu, untuk memastikan perdagangan tetap menguntungkan bagi mereka, para pengusaha dan pemangku kepentingan dapat melakukan berbagai cara, termasuk dengan memberi tekanan kepada pemerintah. Tekanan ini terdiri dari beragam bentuk, seperti ancaman korporasi untuk memindahkan fasilitasnya ke negara lain untuk beroperasi di bawah peraturan lingkungan yang lebih longgar dan menguntungkan. Selain memberikan ancaman, pelaku bisnis juga seringkali berusaha untuk menghalangi atau merusak kebijakan ketat yang dibuat oleh pemerintah, termasuk kebijakan lingkungan. Dalam merusak kebijakan tersebut, para pelaku bisnis biasanya menginfiltrasi peraturan pemerintah dengan agenda setting dan agenda blocking (Kamieniecki, 2006) Implementasi dari tekanan politik sendiri dapat dengan mudah ditemukan di industri garmen Bangladesh. Pada tahun 2013, New York Times melaporkan bahwa kementerian sempat menunjuk seorang pejabat, Munir Chowdhury, untuk menjatuhkan denda kepada pabrik-pabrik tekstil yang membuang limbah secara ilegal di kawasan Savar, Dhaka. Dalam menjalankan tugasnya, Chowdhury melakukan inspeksi yang merupakan bagian dari kampanye penegakan antipolusi dengan menggerebek pabrik yang membuang limbah tanpa mengolahnya. Namun setelah beberapa oknum pemilik pabrik mengeluhkan tindakannya yang sering melakukan denda, pada akhirnya Chowdhury dipindahtugaskan.

2. Ketidakepatuhan

Kepatuhan pabrik RMG adalah persyaratan utama bagi sebagian besar pembeli garmen global. Saat ini kepatuhan bahkan menjadi faktor yang lebih penting untuk mencapai pesanan ekspor garmen daripada kualitas produk. Saat ini, banyak pembeli internasional menuntut kepatuhan dengan kode etik mereka sendiri sebelum menempatkan pesanan impor garmen (Baral, 2010). Untuk menjadi pabrik hijau yang sesuai dengan standar perusahaan fashion, beberapa tahun terakhir ratusan pabrik di Bangladesh bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Tetapi, dari ribuan pabrik dengan skala yang berbeda hanya sedikit pabrik RMG di Bangladesh yang memiliki sertifikasi LEED. Kebutuhan investasi awal dan biaya operasional yang besar menjadi alasan bagi para pemilik pabrik untuk tidak menjadi pabrik bersertifikasi LEED. Meskipun memiliki sertifikasi LEED adalah upaya baik dari negara, tetapi pemilik pabrik hijau tidak mendapatkan insentif apa pun dari pemerintah. Menurut mantan ketua BKMEA, Md Fazlul Hoque, perusahaan dan merek global bahkan mengambil kredit untuk sumber dari pabrik ramah lingkungan, tetapi mereka tidak memberikan harga premium atau harga yang pantas untuk upaya yang telah dilakukan oleh pabrik-pabrik garmen hijau di Bangladesh (New Age Bangladesh, 2022).

Pada tahun 2020, Deutch Welle juga menelusuri sebuah pabrik hijau yang memenuhi standar BGMEA di dekat ibukota Dhaka, Mithela Factory. Pabrik tersebut memproduksi pakaian untuk berbagai merek internasional seperti C&A, H&M dan Zara dengan standar lingkungan yang ketat. Untuk menegakkan standar lingkungan yang baik, Mithela Factory berinvestasi dalam jumlah yang besar. Salah satu alat ramah lingkungan yang digunakan oleh pabrik tersebut adalah sistem pemurnian air modern yang memurnikan air limbah dari proses pewarnaan sebelum mengalirinya ke sungai. Meskipun begitu, Rengin Komoscha selaku pemilik dari Mithela Factory mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sepeser pun uang tambahan dari para pembeli sebagai biaya atas standar produksi ramah lingkungan yang diberlakukan di pabrik tersebut. Padahal, bekerja sama dengan pabrik berstandar hijau memberikan keuntungan kepada buyer dengan meningkatkan kredibilitas serta value mereka di mata konsumen (Flintz & Pützstück, 2020).

Menurut Eckersley, pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat mendorong konsumsi energi serta sumber daya yang tinggi dan mempengaruhi keanekaragaman hayati secara negatif (Eckersley, 2013). Meluasnya dampak lingkungan yang disebabkan oleh rantai pasokan fast fashion pun dapat menjadi gambaran nyata bagi argumen tersebut. Tuntutan konsumsi yang tiada henti mendorong industri ini untuk terus mengeksploitasi alam sambil mencari keuntungan semaksimal mungkin, salah satunya dengan tidak mengolah limbah tekstil. Oleh karena itu, kualitas lingkungan kian menurun. Berangkat dari fakta tersebut, berdasarkan asumsi GPT, tingkat produksi di sektor RMG Bangladesh harus ditekan agar tidak menyebabkan kelangkaan sumber daya. Namun, untuk mencegah hal itu, seluruh aktor yang terlibat tidak bisa semata-mata bergantung pada teknologi karena teknologi hanya akan menjadi alternatif sesaat bukan sebagai solusi permanen. Untuk melakukan perubahan, dibutuhkan revolusi yang menyeluruh dari level aktor terendah. Perubahan akan lahir dari visi, wawasan, eksperimen, dan tindakan miliaran orang sehingga beban untuk mewujudkannya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang atau kelompok, tetapi semua orang (Meadows et al., 2004).

KESIMPULAN

Strategi offshore outsourcing di bawah pemerintahan neoliberal Bangladesh telah membuka ruang bagi kerusakan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah non etikal merupakan sumber utama dari degradasi lingkungan yang terjadi akibat proses produksi RMG. Peneliti pun menemukan bahwa tingginya tingkat limbah produksi yang tercemar dari sektor RMG bukan hanya menjadi tanggung jawab dari para pebisnis fast fashion yang mengalihdayakan proses produksi dan distribusi mereka, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari oknum pemasok atau produsen yang baik secara sadar maupun tidak telah mengabaikan pentingnya penggunaan pengolah limbah air, mengabaikan dampak yang terjadi akibat emisi yang dihasilkan dari mesin-mesin pabrik dan kendaraan yang menjadi bagian dari rantai pasokan dalam bisnis fast fashion, serta mengabaikan pembentukan limbah padat dari proses produksi. Namun, selain faktor personal, perilaku tersebut utamanya dipicu oleh regulasi yang longgar dan cenderung mengutamakan kepentingan investor asing. Karena itu, baik perusahaan yang bergerak di ritel fast fashion, para pemasok, dan pemerintah turut mengambil andil dalam kerusakan lingkungan di Bangladesh.

DAFTAR PUSTAKA

- Balchin, N., & Calabrese, L. (2019). *Comparative Country Study of the Development of Textile and Garment Sectors Lessons for Tanzania*. ODI: Think Change. <https://odi.org/en/publications/comparative-country-study-of-the-development-of-textile-and-garment-sectors-lessons-for-tanzania/>
- Baral, L. M. (2010). Comparative Study of Compliant & Non-Compliant RMG Factories in Bangladesh. *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Comparative-Study-of-Compliant-%26-Non-Compliant-RMG-Baral/778b1b73d876fbb00e837047eada22ede5a00c71#related-papers>
- Barthes, R., Ward, M., & Howard, R. (1983). *The Fashion System*. California: University of California Press.
- Bhuiya, H. M. (2017). *Upcycling The Garment Solid Waste In Bangladesh*. Estonia: Tallinn University of Technology.
- Bick, R., Halsey, E., & Ekenga, C. C. (2018). The global environmental injustice of fast fashion. *Environmental Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods (5th ed.)*. Boston: Allyn & Bacon.
- Bottani, E., Volpi, A., Rizzi, A., Montanari, R., & Bertolini, M. (2014). The role of radio frequency identification (RFID) technologies in improving distribution and retail operations in the fashion supply chain. In *Elsevier eBooks* (pp. 13–41). <https://doi.org/10.1533/9780857098115.13>
- Brik, M., Schoeberl, P., Chamam, B., Braun, R., & Fuchs, W. (2006). Advanced Treatment of Textile Wastewater Towards Reuse Using a Membrane Bioreactor. *Process Biochemistry*, 41(8), 1751–1757. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2006.03.019>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. New York: SAGE Publication.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. New York: SAGE Publication.
- Eckersley, R. (2013). *International Relations Theories* (T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, Eds.; 3rd ed.). London: Oxford University Press.
- Flintz, D. (Producer), & Pützstück, S. (2020). *The Clothes We Wear*. DW. <https://www.youtube.com/watch?v=-64wZkdPRew>
- Ganguly, M., & Human Rights Watch (Organization). (2015). "Whoever Raises their Head Suffers the Most" In *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/report/2015/04/22/whoever-raises-their-head-suffers-most/workers-rights-bangladeshs-garment>
- Haider, M. Z. (2007). Textile and Garment Industry of Bangladesh: An Overview. In *Asia-Pacific Trade and Investment Review* (Vol. 3, Issue 1). <https://www.researchgate.net/publication/326929287>
- Hossain, A., & Hossain, I. (2020). The Environmental Impacts of Textile Dyeing Industries in Bangladesh. *International Research Journal of Advanced Engineering and Science*, 5(2), 113–116. <http://irjaes.com/wp-content/uploads/2020/10/IRJAES-V5N2P97Y20.pdf>
- Hossain, L., Sarker, S., & Khan, M. S. (2018). Evaluation of present and future wastewater impacts of textile dyeing industries in Bangladesh. *Environmental Development*, 26, 23–33. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.03.005>
- IQAir. (2021). Air Pollution in Bangladesh. IQAir. <https://www.iqair.com/bangladesh>
- Kamieniecki, S. (2006). *Corporate America and Environmental Policy: How Often Does Business Get Its Way?*. Stanford: Stanford University Press.
- Khan, M. A., Brymer, K., & Koch, K. (2020). The production of garments and textiles in Bangladesh: trade unions, international managers and the health and safety of workers. *South Asian Journal of Human Resources Management*, 7(2), 276–292. <https://doi.org/10.1177/2322093720944270>
- Khurana, K., & Muthu, S. S. (2021). Are low- and middle-income countries profiting from fast fashion?. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 26(2), 289–306. <https://doi.org/10.1108/jfmm-12-2020-0260>
- Mashoven, S., Smeets, A., Malarciuc, C., Tenhunen, A., & Mortensen, L. F. (2022). Microplastic Pollution From Textile Consumption in Europe. In *European Environment Agency*. <https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a#:~:text=About%20%25%20of%20European%20microplastics,global%20marine%20environment%20each%20year>.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2004). *Limits to Growth: The 30-Year Update*. London: Chelsea Green Publishing.
- Narasimhan, R., & Das, A. (1999). An empirical investigation of the contribution of strategic sourcing to manufacturing flexibilities and performance. *Decision Sciences*, 30(3), 683–718. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1999.tb00903.x>

- Ndubisi, N.O. and Nygaard, A. (2018), The ethics of outsourcing: when companies fail at responsibility, *Journal of Business Strategy*, 39 (5), 7-13. <https://doi.org/10.1108/JBS-03-2018-0037>
- New Age Bangladesh. (2022). Buyers Not Paying Premium Prices But Taking Credit For Sourcing From Green Factories: Experts. In *New Age Bangladesh*. <https://www.newagebd.net/article/161412/buyers-not-paying-premium-prices-but-taking-credit-for-sourcing-from-green-factories-experts>
- Paterson, M. (2005). Green Politics. In *Theories of International Relations* (pp. 235–258). London: Palgrave Macmillan.
- Perkins, S. (2013, July 2). *Clothing and textiles in the industrial Revolution*. blankstyle.com. <https://www.blankstyle.com/articles/clothing-and-textiles-industrial-revolution>
- Rafferty, J. P. (2017, September 30). *The rise of the Machines: Pros and Cons of the Industrial Revolution*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/story/the-rise-of-the-machines-pros-and-cons-of-the-industrial-revolution>
- Raihan, S., Bidisha, S. H., Afroze, A., Rahman, M. M., Hossen, Z., Ahmad, M., & Ahmad, M. (2017). *Improving Working Conditions in the RMG Sector Phase-II: Baseline Study Report*. https://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Publications/WCMS_735614/lang-en/index.htm
- Remy, N., Speelman, E., & Swartz, S. (2016). *Style That's Sustainable: A New Fast-Fashion Formula*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula>
- Richards, J. C., & Schmidt, R. W. (2013). *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (4th ed.)*. London: Routledge.
- Sakib, S. M. N. (2021). *Dhaka Becomes Unlivable As Industrial Pollution Kills River*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/dhaka-becomes-unlivable-as-industrial-pollution-kills-rivers/2407165>
- Sarker, A. E. (2003). The Illusion of Decentralization: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Public Sector Management*, 16(7), 523–548. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513550310500391/full/html>
- Sarwar, M. G. (2021). Making a Case for Environmental Rule of Law in Bangladesh. *The Daily Star*. <https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/making-case-environmental-rule-law-bangladesh-2106989>
- Sohani, N. Z., Chaklader, M. A., Faruquee, M. H., Bashar, M. A., Yasmin, R., & Yasmin, N. (2011). *Pattern of Workplace Violence Against Female Garment Workers in Selected Areas of Dhaka City*. https://www.researchgate.net/publication/233883183_PATTERN_OF_WORKPLACE_VIOLENCE_AGAINST_FEMALE_GARMENT_WORKERS_IN_SELECTED_AREAS_OF_DHAKA_CITY#:~:text=By%20patterns%20of%20workplace%20violence,we re%20victims%20of%20sexual%20harassment.

- Speed, A. G. (2019). *Impact of fast fashion and international law on workers and the environment* [MA Thesis]. Oklahoma State University. <https://hdl.handle.net/11244/329906>
- Statista. (2019). Per Capita Production of Textile Fibers Worldwide From 1975 to 2020, with a Forecast For 2025 and 2030. <https://www.statista.com/statistics/1260339/global-textile-fiber-production-per-capita/#:~:text=Textile%20fiber%20production%20per%20capita%20worldwide%201975%2D2030&text=In%201975%2C%20the%20global%20production,kilograms%20per%20capita%20by%202030>.
- Thomas, D. (2019). *Fashionopolis: The Price of Fast fashion—and the Future of Clothes*. New York: Penguin Press.
- Thomas, P. W. (2023). What is Fashion? Fashion Theories. In *Fashion Era Website*. www.fashion-era.com/sociology_semiotics.htm.
- Uddin, M., Tushar, S. I., & Sakib, S. (2020). Producing Sanitary Pads from Knitwear Waste in Bangladesh. *Materials Circular Economy*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s42824-020-00008-w>
- Yardley, J. (2013). Bangladesh Pollution, Told in Colors and Smells. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2013/07/15/world/asia/bangladesh-pollution-told-in-colors-and-smells.html>
- Yunus, M. and Yamagata, T. (2012) The Garment Industry in Bangladesh. In: *Fukunishi, T., Ed., Dynamics of the Garment Industry in Low Income Countries: Experience of Asia and Africa, Interim Report, ChousakenKyu, Huokokusho, IDE-JETRO*, Chapter 6.
- Zohir, S. C. (2001). Social Impact of the Growth of Garment Industry in Bangladesh. *The Bangladesh Development Studies*, 27 (4), 41-80. <https://www.jstor.org/stable/40795642>